

ISSN 2830-6015 (online)  
vol.2 no.2 (2023)

# JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK [ JIMAP ]

2023  
DESEMBER



*Program Pascasarjana  
Magister  
Administrasi Publik*

<https://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/jimap>

Diterbitkan oleh Program Pascasarjana  
Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong



**Daftar Isi**

**Artikel**

- EFEKTIFITAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI  
 DESA SUNGAI PAYANG KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**Fajar Husbi, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, Musmuliadi** ..... 176-183
- PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  
 PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETKAB KABUPATEN KUTAI BARAT  
**Paulus, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, Musmuliadi** ..... 184-199
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT  
**Petrus Husen, Yonathan Palinggi, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya** ..... 200-212
- PELAKSANAAN KEWENANGAN KECAMATAN DALAM PEMBANGUNAN  
 INFRASTRUKTUR SKALA KECIL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**Muhammad Subandi, Sahrizal, Oktavia Nuraini** ..... 213-222
- EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAN  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA DI KECAMATAN MUARA KAMAN  
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**Muhammad Subandi, Novira Cahya Wulan Sari, Almi Iljab Akim** ..... 223-240

*JIMAP*  
**JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK**

**Penerbit:**

Program Magister Pascasarja (S2)  
Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

**Pelindung:**

Rektor Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

**Chief in Editor:**

Dr. Ir. Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, M.Si

**Editorial boards:**

Dr. Gaspar Pera, SE., M.Si.  
Dr. Bambang Arwanto, A.P., M.Si.  
Dr. Achmad Zais, SE., M.Si.  
Rusman, S.Sos., M.Si.

**Reviewers:**

Prof. Dr. Iskandar, SE., M.Si, Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Indonesia  
Dr. Sudirman, SIP., M.Si, Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Indonesia  
Dr. Sabran, SE., M.Si., Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Indonesia  
Dr. Marjoni Rachman, M.Si, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia  
Dr. Yana Ulfah, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS., Universitas Mulawarman, Indonesia  
Dr. I Made Suidharma, SE., MM., Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Indonesia  
Dr. Drs. I Nyoman Subanda, M.Si, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Indonesia  
Agus Fredy Maradona, S.E., M.S.A., Ph.D., Ak., Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

**Administration and Technical Editor:**

Mulyati; Darwin; Endang Wahyuni; Fahririzal; Rossidah; Handayani Miar

**Alamat Redaksi:**

Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Magister Administrasi Publik  
Jl. Gunung Kombeng No.27 Kel.Melayu Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75512,  
e-mail: [mapunikarta@unikarta.ac.id](mailto:mapunikarta@unikarta.ac.id); HP: 081350321841; 08115544443; 085247358365  
JIMAP diterbitkan pertama kali tahun 2022, Terbit 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember

**EFEKTIFITAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BAGI MASYARAKAT  
MISKIN DI DESA SUNGAI PAYANG KECAMATAN LOA KULU  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**EFFECTIVENESS OF NON-CASH FOOD ASSISTANCE (BPNT) FOR THE COMMUNITY  
POOR IN SUNGAI PAYANG VILLAGE, LOA KULU SUB DISTRICT  
KUTAI KARTANEGARA REGENCY**

**Fajar Husbi<sup>1</sup>, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya<sup>2</sup>, Musmuliadi<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup>**UNIVERSITAS KUTAI KAARTANEGARA TENGGARONG**

[fajar9husbi@gmail.com](mailto:fajar9husbi@gmail.com), [tenaya@unikarta.ac.id](mailto:tenaya@unikarta.ac.id), [musmuliadi250473@gmail.com](mailto:musmuliadi250473@gmail.com)

**Abstrack**

*The purpose of this study was to analyze the effectiveness of Non-Cash Food Assistance (BPNT) for the Poor in Sungai Payang Village, Loa Kulu Sub District, Kutai Kartanegara District, and to determine the supporting and inhibiting factors for the effectiveness of Non-Cash Food Assistance (BPNT) for the Poor in Sungai Payang Village. Loa Kulu Sub District, Kutai Kartanegara Regency. The data sources range from representatives of micro-business owners who receive assistance, heads of RTs, and village representatives, representatives of the Social Service, district officials, and community leaders and other residents. This research is a research using a qualitative method approach with data collection techniques using interviews and documentation studies. The data analysis method used is descriptive qualitative. The results showed that the program's target accuracy The target accuracy indicator had not been carried out optimally. There are people who still complain about the accuracy of the target distribution of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT). One of the problems with the accuracy of targeting beneficiaries or the so-called Beneficiary Families (KPM) was caused by the initial data collection of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT). Program Socialization Indicators of program socialization carried out were quite optimal. Most of the Beneficiary Families (KPM) of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Sungai Payang Village, Loa Kulu Sub District, have mostly participated in socialization activities for the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program held by Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) officers. So that the Beneficiary Families (KPM) know about the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT). Achievement of Program Objectives Indicators of achievement of objectives have not been carried out optimally. Because they see that there are still Beneficiary Families (KPM) who are not smooth in receiving assistance. However, there are also several Beneficiary Families (KPM) who are smooth in receiving assistance and have no obstacles at all. Program Monitoring Program monitoring indicators have not been carried out optimally. Because he saw the uneven distribution of program monitoring activities carried out by officers. So that not all Beneficiary Families (KPM) in Sungai Payang Village, Loa Kulu Sub District, can report problems in the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) easily. There are even some who don't even know who to report to. Several other Beneficiary Families (KPM) have tried to report only to the e-Warong owner, because they did not know who to report to and what the complaint mechanism was like.*

**Keywords: Effectiveness, Non-Cash Food Assistance, Poor Communities**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Sumber datanya mulai dari perwakilan warga pemilik usaha mikro penerima Bantuan, Ketua RT, dan perwakilan Desa, perwakilan Dinas Sosial, pihak Kecamatan, dan tokoh masyarakat serta warga lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan Sasaran Program Indikator ketepatan sasaran belum dilakukan dengan maksimal. Masyarakat masih ada yang mengeluhkan terkait ketepatan sasaran Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Masalah ketepatan sasaran penerima bantuan atau yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) salah satunya disebabkan pada pendataan awal adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sosialisasi Program Indikator sosialisasi program yang dilakukan cukup maksimal. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu sebagian besar sudah pernah mengikuti kegiatan sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diadakan oleh petugas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengetahui tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pencapaian Tujuan Program Indikator pencapaian tujuan belum dilakukan dengan maksimal. Karena melihat masih adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak lancar dalam penerimaan bantuannya. Namun ada juga beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lancar dalam penerimaan bantuannya dan tidak memiliki hambatan sama sekali. Pemantauan Program Indikator pemantauan program belum dilakukan dengan maksimal. Karena melihat tidak meratanya kegiatan pemantauan program yang dilakukan petugas. Sehingga tidak semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu yang dapat melaporkan masalah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan mudah. Bahkan ada beberapa yang tidak mengetahui sama sekali untuk melapor ke siapa. Beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lainnya ada yang mencoba melapor ke pemilik e-Warong saja, karena tidak mengetahui melapor ke siapa dan seperti apa mekanisme pengaduannya.

**Kata Kunci : Efektivitas, Bantuan Pangan Non Tunai, Masyarakat Miskin.**



## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang ada di berbagai negara termasuk negara ini, dan kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi kemiskinan, dan perlu dicarikan perspektif yang baru atau yang berbeda untuk melihat, menafsirkan, dan memaknai apa yang dinamakan dengan kemiskinan. kemiskinan Indonesia. Kemiskinan yang multidimensional ini mencakup kemiskinan dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dalam dimensi sosial, politik, dan budaya kemiskinan dalam segala dimensi yang ada baik pendidikan, sejarah kemiskinan dalam dimensi sosio-politik (wacana), kemiskinan yang berdimensi pendidikan, agama, budi pekerti, serta kemiskinan dalam dimensi perdamaian dunia (hubungan bilateral atau diplomasi).

Pemerintahan Jokowi periode kedua mengajak kita menciptakan manusia Indonesia unggul agar Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah tinggi. Saat ini yang kita hadapi kemiskinan absolut sekitar 25 juta orang. Bahkan, 40 persen penduduk atau 100 juta manusia Indonesia mudah jatuh miskin dan hidupnya tak stabil. Turbulensi politik, ekonomi dan bencana saat ini makin membuat kita masih dihantui kemiskinan. Seruan Presiden untuk perkuat 1.000 hari kehidupan bukanlah pencitraan. Ini soal serius. WHO memperingatkan, 30 persen atau 7 juta anak Indonesia gagal tumbuh. Tertinggi di ASEAN. Gagalnya jutaan bayi tumbuh bukan soal gizi buruk belaka tetapi akibat hidup ibunya buruk, lingkungan tempat tinggal, pendidikan dan keadaan ekonomi juga buruk.

Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Widodo pada rapat terbatas tentang Program Raskin pada Juli 2016, penyaluran Raskin diganti dengan menggunakan kartu elektronik yang akan diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran, sehingga bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM (keluarga penerima manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-warong* yang bekerjasama dengan Bank Penyalur. Kekuatan bantuan sosial pangan non tunai ini adalah penerima manfaat secara efisien dan efektif mampu mengoptimalkan bantuan yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sehingga secara tidak langsung dapat

menggairahkan kehidupan ekonomi yang bersangkutan, terjadinya proses internalisasi keuangan inklusif kepada fakir miskin melalui revitalisasi peran lembaga perbankan, terhindarnya sejumlah kasus inefisien dan inektivitas sebagaimana penyaluran bantuan sosial pangan sebelumnya dan memerlukan manajemen yang baru. Pelaksanaan program BPNT (mencakup : registrasi, penggantian data, kontak informasi dan pengaduan) yang terdiri dari Kordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kabupaten/ Kota, Kordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/ Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH dan Asisten pendamping PKH untuk daerah sulit.

Dari situ, calon KPM akan mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan. Data yang telah diisi oleh calon penerima program ini lalu diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Kantor Kelurahan dan Kantor Walikota/Kabupaten. Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke *e-warong* (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS. *E-warong* adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan atau penukaran/pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen bank yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

KPM dapat membeli bahan pangan sesuai kebutuhan pada *e-warong* yang memiliki tanda lokasi penyaluran bantuan sosial non tunai. Transaksi dilakukan secara non tunai mengacu pada jumlah saldo yang tersimpan pada chip KKS. Lewat sistem yang terhubung dengan perbankan ini, penyalur bantuan akan mendapatkan laporan rinci seputar jumlah dana yang telah disalurkan, jumlah dana yang ditarik oleh penerima, jumlah dana yang tersisa dan berapa orang penerima yang belum menarik bantuannya.

menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Kecamatan Loa Kulu pada tahun 2019 sebesar 17,35% dari jumlah penduduk 219.139 yang tersebar di 5 Desa yang ada di Kecamatan Loa Kulu. Hal tersebut lebih rendah dari angka kemiskinan pada tahun 2018 pada angka 17,74%. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang digambarkan di atas, sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Daerah mulai tahun 2007

telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT dikenal di negara lain dengan istilah *Non Cash Food Assistance*. Program BPNT bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin.

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, mulai dari: a) program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, b) program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, serta c) program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. Kajian terhadap efektivitas pemberian bantuan kepada masyarakat miskin perlu dilakukan, agar dapat menentukan proses administrasi program bantuan pemerintah untuk masyarakat desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum. Landasan teori bantuan sosial yang digunakan sebagai kerangka teori adalah definisi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (2017) oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai yang menyatakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Pasolong (2017), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata 'efek' dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Kurniawan (2018), efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sementara Effendy (2013), menyebutkan bahwa efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Program BPNT merupakan bagian dari

program penanggulangan kemiskinan yang ada pada Kluster pertama, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan dan disalurkan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018 bantuan pangan akan disalurkan ke masing-masing kabupaten/kota dalam bentuk non tunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras dan atau Telor.

Tujuan program BPNT adalah sebagai berikut: mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM); meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM); memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan; serta mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*).

Pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi yang ingin berpartisipasi dalam penyaluran Bantuan Sosial dapat mendaftarkan diri ke Bank Penyalur sebagai e-warong. Untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai agar saling terinterkoneksi dan terinteroperabilitas, maka digunakan layanan principal pembayaran yang dimiliki dan/atau dikelola oleh bank umum milik Negara.

- Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari BPNT, yaitu:
1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
  2. Meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia.
  3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
  4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
  5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Istilah masyarakat miskin, mengandung 2 (dua) unsur kata, yaitu masyarakat, dan miskin atau kemiskinan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017), masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Awal dari masyarakat berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih besar menjadi suatu kelompok besar orang yang disebut

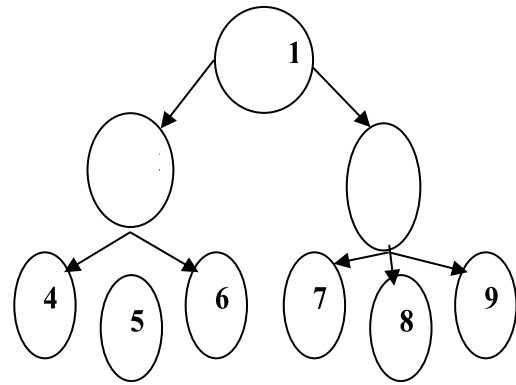
masyarakat. Soetomo, (2019) menjelaskan suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat, Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang terus-menerus antar-individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu ditemui kehidupan individu dengan masyarakat yang saling memengaruhi. Pengertian masyarakat juga dapat diartikan sebagai golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan. Serta saling memengaruhi satu sama lain. Pengguna istilah masyarakat dapat menggambarkan bahwa hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang lain. Pengertian masyarakat tidak akan bisa dilepaskan dari kebudayaan dan kepribadian. Hal ini karena individu di dalamnya tidak bisa lepas dari nilai-nilai, norma, tradisi, kepentingan, dan lain sebagainya. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin dan untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

### METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Disebut penelitian deskriptif, karena penelitian ini bermaksud untuk memaparkan secara cermat terhadap gejala-gejala (fenomena) sosial, situasi dan kondisi, atau kejadian-kejadian yang diamati dengan mengembangkan konsep dan berusaha untuk menghimpun fakta-fakta yang nampak namun tidak melakukan pengujian hipotesis. Secara khusus penelitian ini bersifat ingin menggambarkan fakta-fakta yang ada di lapangan serta berupaya untuk mencari akurasi penyebabnya.

Wilayah penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu. Alasan pemilihan obyek dan lokasi penelitian dikarenakan selama ini belum pernah dilakukan penelitian berkaitan dengan efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai bagi Masyarakat Miskin di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu adalah wilayah penerima bantuan pangan non tunai terbanyak.

dalam proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan variasi informasi, atau sudah dianggap sudah memadai, maka peneliti tidak lagi mencari informasi baru karena proses pencarian informasi dianggap telah cukup. Oleh karena itu jumlah responden yang menjadi informan, bisa sedikit dan juga bisa banyak tergantung dari tepat tidaknya informasi awal atau informan kunci serta kompleksitas atau keragaman fenomena sosial yang diteliti. dengan teknik *purposive sampling* menggunakan kaidah *snowball sampling*. Skema pengambilan sampel secara *snowball sampling* dapat digambarkan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1  
Snowball Sampling

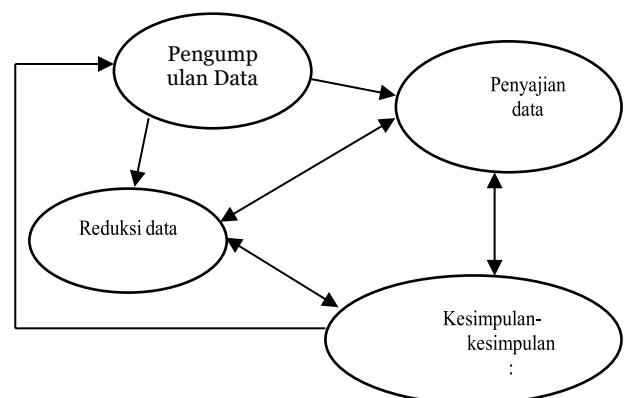
Keterangan :

- 1 = Kepala Desa/Kades,
- 2 = Sekretaris Desa/Sekdes,
- 3 = Ketua RT,
- 4, 5, dan 6 = Perwakilan warga penerima bantuan pangan non tunai
- 7 = Perwakilan Kecamatan,
- 8 = Perwakilan Dinas Sosial

Dalam mengumpulkan data yang akan mendukung penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa proses dan teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi
2. Dokumentasi
3. wawancara

dalam penelitian ini banyak data dalam bentuk kualitatif (hasil wawancara), di samping data sekunder, maka dalam menganalisis data dilakukan Model Interaktif, seperti dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Terjemahan Tjejep Rohedi Rohendi, 2012) dengan langkah-langkah seperti Gambar 2.



Gambar 2  
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan**

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu target penting pemerintah, yang mana melalui program-program pengentasan kemiskinan diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia. Efektivitas program pengentasan kemiskinan sampai sekarang masih menjadi perhatian publik, yaitu bagaimana agar program-program pengentasan kemiskinan yang diciptakan oleh pemerintah dapat mengurangi angka kemiskinan. Program dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta menghasilkan perubahan. Untuk melihat efektivitas suatu program, tentunya akan ditemukan variabel-variabel yang terkait dengan efektivitas program. Pada bagian pembahasan ini, penulis menggunakan peneliti menggunakan indikator-indikator untuk mengukur efektivitas menurut Sugiyono dalam Budiani (2007) karena peneliti ingin mengetahui ukuran efektivitas dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Sungai Payang. Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam dalam pengukuran efektivitas ini yaitu:

1. Ketetapan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Pencapaian tujuan program
4. Pemantauan Program.

### **Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan Berkaitan dengan Ketepatan Sasaran Program**

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sasaran dari penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah orang-orang yang termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau orang-orang kurang mampu. Berdasarkan data KPM BPNT Kecamatan Loa Kulu diketahui bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sungai Payang yang diberikan oleh Kementerian Sosial sebanyak 147 KPM yang tersebar di 20 Rukun Tetangga (RT) Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih kurang tepat sasaran, karena masih ada masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan tetapi tidak mendapatkannya sama sekali, melainkan yang tidak berhak atas bantuan ini atau dikatakan mampu yang mendapatkan bantuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tepat sasaran akan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh penerimanya dari segi ekonomi.

### **Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan Berkaitan dengan Sosialisasi Program**

Sosialisasi program merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program yang menentukan keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sosialisasi program harus dilakukan dengan cara-cara yang terencana dan sistematis dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik. Sosialisasi program dalam pengukuran efektivitas program dapat dilihat dari kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang kongkret, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif.

Sosialisasi program, dapat berkaitan dengan sejauh mana stakeholder atau pemangku kepentingan dan kelompok kepentingan lainnya mengetahui, memahami serta memberikan sosialisasi atau proses pemahaman kepada masyarakat terkait Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini seperti kutipan hasil wawancara yang dipaparkan oleh salah satu informan yang menyatakan: "Sosialisasi yang dilakukan biasanya terkait pemahaman kepada masyarakat tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu mekanisme pelaksanaan program dan pemanfaatan program ataupun menjawab masalah atau kendala yang dimiliki oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam penerimaan program ini".

### **Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan Berkaitan dengan Pencapaian Tujuan Program**

Tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya. Pencapaian tujuan program dalam pengukuran efektivitas program dapat dilihat dari sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Dalam hal ini pelaksanaan sebuah program harus mampu termanifestasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga keefektifan suatu program dapat diukur dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi



kebutuhan pangan. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hal ini seperti hasil wawancara dengan informan "Tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini kan salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran dan memberikan nutrisi yang lebih seimbang, menurut saya dengan adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini sudah bisa untuk mengurangi beban pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan pangan KPM dengan diberikan bantuan pangan setiap bulannya. Program ini mencapai beberapa tujuannya meskipun belum maksimal.

### **Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan Berkaitan dengan Pemantauan Program**

Pemerintah bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan program publik. Kewajiban ini dapat dilakukan jika pemerintah mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan dan program itu sendiri. Sistem pemantauan dan evaluasi yang berfungsi dengan baik adalah alat untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pemantauan program dalam pengukuran efektivitas program dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Secara spesifik, pemantauan dan evaluasi bertujuan menghasilkan informasi mengenai kemajuan dan kualitas pelaksanaan pelayanan dan program, mengidentifikasi masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaan pelayanan dan program, memberikan penilaian terhadap keberhasilan pelayanan dan program baik dari segi output, manfaat maupun dampaknya dan menjelaskan keberhasilan, kekurangan atau kegagalan pelayanan dan program.

Pemantauan Program Bantuan Non Tunai di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu masih kurang efektif, karena petugas yang tidak tentu waktunya untuk melakukan pemantauan di beberapa titik pada pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sehingga banyak diantara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mendapatkan kelancaran dana bantuan hanya bisa diam dan menunggu ataupun mengadu kepemilik e-Warong terdekat saja karena belum memahami dengan baik mekanisme pengaduannya. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu informan pada saat wawancara dengan peneliti.

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mencapai efektivitas program. Adapun faktor pendukung tersebut meliputi :

1. Tingginya partisipasi masyarakat dalam menerima program BPNT untuk mengetahui informasi mekanisme penyaluran BPNT
2. Lokasi E-Warong/tempat penukaran BPNT yang strategis. Jarak antara EWarong/tempat pencairan bantuan dengan tempat tinggal Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak begitu jauh, memudahkan KPM dalam melakukan pencairan bantuan yang diterimanya.
3. Komitmen pemerintah dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam meningkatkan program BPNT dengan melakukan verifikasi data penerima program BPNT.

Sedangkan faktor penghambat dalam mencapai efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi :

1. Data penerima BPNT yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial masih kurang valid, dikarenakan masih terdapat tidak tepat sasaran dari data penerima BPNT yaitu masyarakat yang secara ekonomi mapan (kaya) namun masih terdapat sebagai peserta KPM penerima BPNT. Sedangkan terdapat warga yang secara ekonomi memenuhi syarat untuk masuk sebagai peserta KPM penerima BPNT namun tidak terdaftar.
2. Waktu pengawasan pelaksanaan program BPNT yang tidak secara rutin setiap bulannya pada saat pencairan bantuan kepada KPM penerima manfaat membuat beberapa masalah yang dialami oleh KPM tidak segera dapat diselesaikan, karena ketiadaan petugas membuat KPM mengalami kebingungan untuk melaporkan permasalahan yang dihadapi.

### **SIMPULAN**

Ketepatan Sasaran Program Indikator ketepatan sasaran belum dilakukan dengan maksimal. Masyarakat masih ada yang mengeluhkan terkait ketepatan sasaran Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Masalah ketepatan sasaran penerima bantuan atau yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) salah satunya disebabkan pada pendataan awal adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sosialisasi Program Indikator sosialisasi program yang dilakukan cukup maksimal. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu sebagian besar sudah pernah mengikuti kegiatan sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diadakan oleh petugas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengetahui tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pencapaian Tujuan Program Indikator pencapaian tujuan belum dilakukan dengan maksimal. Karena melihat masih adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak

lancar dalam penerimaan bantuannya. Namun ada juga beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lancar dalam penerimaan bantuannya dan tidak memiliki hambatan sama sekali.

Pemantauan Program Indikator pemantauan program belum dilakukan dengan maksimal. Karena melihat tidak meratanya kegiatan pemantauan program yang dilakukan petugas. Sehingga tidak semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu yang dapat melaporkan masalah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan mudah. Bahkan ada beberapa yang tidak mengetahui sama sekali untuk melapor ke siapa. Beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lainnya ada yang mencoba melapor ke pemilik e-Warong saja, karena tidak mengetahui melapor ke siapa dan seperti apa mekanisme pengaduannya.

### REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi Dalam rangka Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang lebih efektif di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu diantaranya:

1. Ketepatan Sasaran Program Seharusnya pada pendataan dilakukan merata dan tepat sasaran sehingga yang menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya pendataan ulang yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang melibatkan pengurus e-Warong sebagai penyalur Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan dapat menjadikan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lebih tepat sasaran.
2. Sosialisasi Program Seharusnya dalam melakukan kegiatan sosialisasi lebih rutin untuk dilakukan. Dalam hal ini diharapkan agar kegiatan sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini lebih sering dilakukan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih merasakan dampak dari adanya program ini.
3. Pencapaian Tujuan Program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ada yang sering kosong saldonya, namun ada juga beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lancar dalam penerimaan bantuannya dan tidak memiliki hambatan sama sekali. Dalam hal ini diharapkan agar dapat diperbaiki dan tidak terus menerus terjadi sehingga tujuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dengan maksimal.
4. Pemantauan Program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ada beberapa yang tidak mengetahui sama sekali untuk melapor ke siapa. Beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lainnya ada yang mencoba melapor ke pemilik e-Warong saja, karena tidak mengetahui melapor ke siapa

dan seperti apa mekanisme pengaduannya. Dalam hal ini diharapkan agar dapat dilakukan perbaikan dalam perbaikan program. Sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2013). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Cet. I. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Agustino, Leo. (2019). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- H.B., Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta : Universitas Negeri Sebelas Maret, 2006
- Arikunto, Suharsimi. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi IV)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. (2002). *Kebijakan Publik (Konsep dan Strategi)*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.
- Gultom, Helvine, Paulus Kindangen, dan George M.V. Kawung, (2016), *Analisis, Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Pedoman Umum Raskin Beras Bersubsidi Untuk Rumah Tangga Miskin*. Jakarta, (2011).
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 140/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018.
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2017 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2017 Tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- Kettner, Peter M. (2012). *Human Social Organizations*. Boston. A Pearson Education Company. ISBN 0-205-31878-9.
- Miles, B., & Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis data Kualitatif*. Terj. Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI Press.
- Smeru. (2017). *Kajian Awal Pelaksanaan Program E-Warong Kube PKH*. Jakarta: Kompas.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. (2011). *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Komputindo.
- Nugroho D, Riant. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai. Cetakan Pertama. (2017). Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.
- Pedoman Umum BPNT. (2018) <http://tnp2k.go.id/program/klaster-i-2/>. Diakses Tanggal 7 Juli 2021. Jam; 21.30. wita.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228 /PMK.05/2016 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara/ lembaga.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27).
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940).
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680).
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191).
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang strategi nasional keuangan inklusif.
- Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. (2018). Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Reformasi DOI: <http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1454>. ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online). Volume 9 Nomor 2 (2019).
- Rex A. Skidmore. (1995). *Social Work Administration Dynamic Management and Human Relationships. Third Edition*. Allyn & Bacon A simon & schuster Company Needham Heights, ISBN 0-13-669037-8.
- Solichin, Abdul Wahab. (2011). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. (2010). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Siregar, Anggi Anggrayni, (2019), *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-warong di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu*, Magister Studi Pembangunan dalam Program Studi Magister Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.
- Suwitri, Sri. (2018). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tangkilian, Hessel Nogi S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: YPAPI.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- Yunus, Eko Yudianto, (2019), *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Jawa Timur*, Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga Probolinggo.